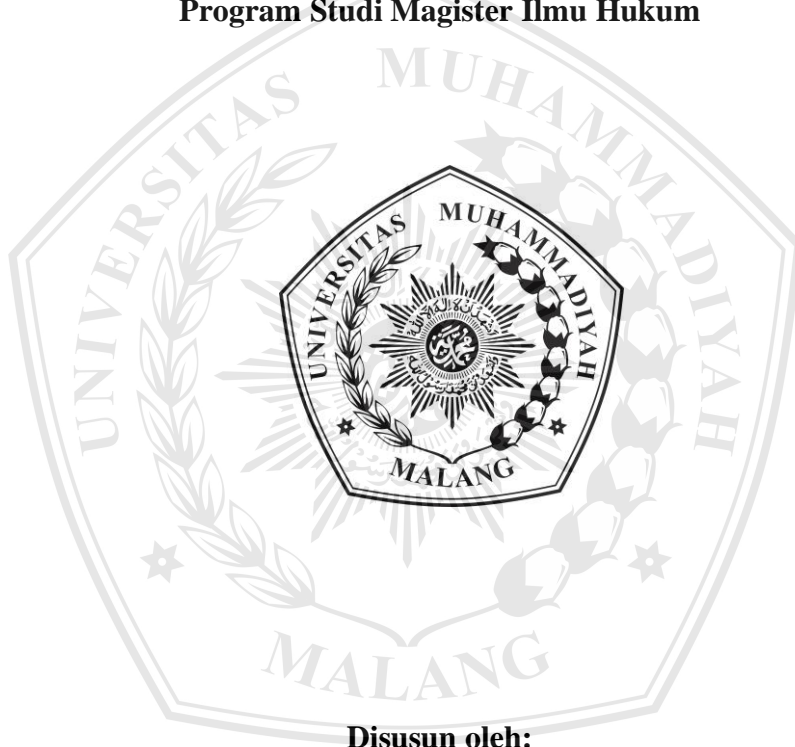


**URGENSI PIDANA TAMBAHAN PENGUMUMAN PUTUSAN HAKIM
PASCA PENYELENGGARAAN SISTEM PUBLIKASI PUTUSAN
MELALUI DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-2
Program Studi Magister Ilmu Hukum**



Disusun oleh:

**DWI ARMY OKIK ARISSANDI
NIM: 201810380211018**

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
APRIL 2020**

**URGENSI PIDANA TAMBAHAN PENGUMUMAN PUTUSAN HAKIM
PASCA PENYELENGGARAAN SISTEM PUBLIKASI PUTUSAN
MELALUI DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG**

**DWI ARMY OKIK ARISSANDI
201810380211018**

Telah disetujui

Pada hari/tanggal, **Senin / 20 April 2020**

Pembimbing Utama



Mokh. Najih., Ph.D

Pembimbing Pendamping



Dr. Haris Tofly

Direktur
Program Pascasarjana



Prof. Akhsanul In'am, Ph.D

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Mokh. Najih., Ph.D

TESIS

DWI ARMY OKIK ARISSANDI
201810380211018

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada hari/tanggal, Senin / 20 April 2020
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua / Penguji : Mokh, Najih, Ph.D

Sekretaris / Penguji : Dr. Haris Tofly

Penguji : Dr. Tongat

Penguji : Dr. Sulardi

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **DWI ARMY OKIK ARISSANDI**

NIM : **201810380211018**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul : **URGENSI PIDANA TAMBAHAN PENGUMUMAN PUTUSAN HAKUM PASCA PENYELENGGARAAN SISTEM PUBLIKASI PUTUSAN MELALUI DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG** adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 20 April 2020

Yang menyatakan,



DWI ARMY OKIK ARISSANDI

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji yang senantiasa kita dipanjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada seluruh makhluknya di muka bumi ini tanpa ada batasnya. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah merubah zaman dengan kegigihannya dan keikhlasannya, dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah yang penuh rahmat ini.

Dengan ridha Allah SWT yang telah memberikan hidayah-Nya berupa keimanan, ketegasan, kekuatan, kegigihan, ketekunan, kesabaran serta keikhlasan kepada penulis, sehingga mampu menyelesaikan penulisan hukum (tesis) ini dengan baik dan lancar, yaitu dengan judul **“URGENSI PIDANA TAMBAHAN PENGUMUMAN PUTUSAN HAKIM PASCA PENYELENGGARAAN SISTEM PUBLIKASI PUTUSAN MELALUI DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG”** yang merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Magister Ilmu Hukum, Direktorat Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Malang.

Dengan banyaknya dukungan baik secara moril dan materiil dari keluarga, saudara, pembimbing dan berbagai pihak terkait, tugas akhir ini dapat diselesaikan oleh penulis sesuai waktu yang diinginkan. Berbagai macam hambatan, godaan, dan kekecewaan merupakan sebuah konsekuensi untuk dihadapi dalam berjuang dan berproses. Jiwa optimisme dan rasa cinta kasih yang menjadi pondasi oleh penulis untuk tetap fokus serta *istiqomah* dalam menyelesaikan tesis sesuai dengan yang diharapkan. Oleh sebab itu, penulis sudah sepatutnya menyampaikan rasa terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam menempuh pendidikan.
2. Bapak Dr. Fauzan, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.

3. Bapak Prof. Akhsanul In'am, Ph.D selaku Direktur Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Bapak Mokh. Najih, Ph.D., selaku Kepala Program Studi (Kaprod) Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan Pembimbing I (satu) penulisan hukum ini yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dengan penuh keikhlasan dan kesabaran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Bapak Dr. Haris Tofly, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dengan penuh keikhlasan dan kesabaran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
6. Keluarga yaitu Ibu Sukarmi dan Bapak Suyono selaku orang tua penulis, Ika Retno Wiri Ir Yanti selaku kakak kandung penulis, Gabriel Wiska Anugerah selaku keponakan penulis, yang telah memberikan doa dan kasih sayang serta menjadikan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini;
7. Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1 A, Bapak Hongkun Otoh, S.H., M.H. yang banyak memberikan bimbingan dan ilmu serta pelajaran berharga bagi penulis;
8. Ketua Pengadilan Negeri Labuha Kelas II, Bapak Achmad Rasjid, S.H., yang banyak memberikan bimbingan dan ilmu serta pelajaran berharga bagi penulis;
9. Bapak Lucius Sunarno, S.H., M.H., Bapak Ir. Abdul Rahman Karim, S.H., dan Bapak Rustam, S.H., M.H selaku hakim dan mentor calon hakim di Pengadilan Negeri Samarinda yang selalu memberikan ilmu, pengalaman dan pengetahuan kepada penulis;
10. Bapak-bapak Hakim serta seluruh pegawai Pengadilan Negeri Samarinda yang banyak memberikan dukungan kepada penulis.
11. Bapak-bapak Hakim serta seluruh pegawai Pengadilan Negeri Labuha yang banyak memberikan dukungan kepada penulis;
12. Sahabat-sahabat (mentee/calon hakim) yang magang di satuan kerja Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1 A yaitu Rieya Aprianti, M. Larry Izmi, Kristin Jones Manurung, Allen Jaya Akasa, Vega Sarlita, Keumalasari, Rini Ayu Lestari, Syaifullah, Cristian Elizer Rumbajan, Benny Haninta Surya, dan R. Androu Mahasvira;

13. Rekan-rekan seperjuangan pendidikan calon hakim (cakim) angkatan VIII dan saudara, sahabat serta teman-temannya lainnya yang mendukung secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;

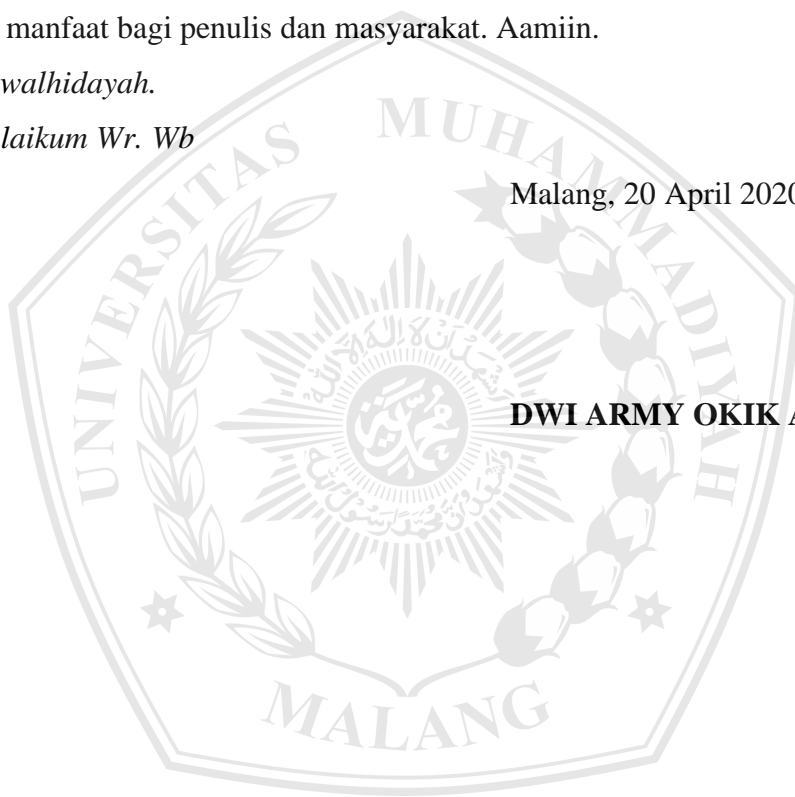
Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal dengan beribu-ribu kasih sayangnya atas dukungan, kebaikan, pengorbanan, perjuangan, keikhlasan dan kesabarannya. Penulisan hukum ini sudah dilakukan dengan pengkajian secara ilmiah dan dibimbing oleh pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Besar harapannya untuk diberikan saran dan masukan untuk kebaikan bersama. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan masyarakat. Aamiin.

Billahitaufiqwalhidayah.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Malang, 20 April 2020

DWI ARMY OKIK ARISSANDI



DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| LEMBAR PENGESAHAN | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR TABEL | ix |
| Abstrak | x |
| <i>Abstract</i> | xi |
| PENDAHULUAN | 1 |
| RUMUSAN MASALAH | 3 |
| TINJAUAN PUSTAKA | 4 |
| Tinjauan Umum Mengenai Pidana Tambahan. | 4 |
| Tinjauan Umum Pengumuman Putusan Hakim. | 8 |
| Tinjauan Umum Mengenai Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan. | 12 |
| Tinjauan Umum tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. | 15 |
| METODE PENELITIAN | 18 |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 20 |
| Kedudukan antara Publikasi Putusan Pengadilan sebagai Informasi Publik dengan Pengumuman Putusan Hakim sebagai Pidana Tambahan. | 20 |
| 1. Kedudukan Pidana Tambahan berupa Pengumuman Putusan Hakim | 20 |
| 2. Kedudukan Publikasi Putusan Melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung ... | 22 |
| Urgensi Pidana Tambahan Pengumuman Putusan Hakim Pasca Penyelesaian Sistem Publikasi Putusan Melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung | 27 |
| KESIMPULAN | 31 |
| SARAN | 33 |
| DAFTAR PUSTAKA | 34 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1: Perbandingan kedudukan antara pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dengan publikasi putusan melalui direktori putusan Mahkamah Agung | 23 |
|--|----|



URGENSI PIDANA TAMBAHAN PENGUMUMAN PUTUSAN HAKIM PASCA PENYELESAIAN SISTEM PUBLIKASI PUTUSAN MELALUI DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

DWI ARMI OKIK ARISSANDI

dwiarmyokik@gmail.com

Mokh. Najih, Ph.D (NIDN. 0017056501)

Dr. Haris Tofly (NIDN. 001307671)

Magister Ilmu Hukum

Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang

Abstrak

Pengumuman putusan hakim merupakan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang melanggar delik-delik tertentu. Namun di era keterbukaan informasi publik, putusan hakim merupakan informasi publik yang wajib untuk dipublikasikan melalui direktori putusan Mahkamah Agung, karena putusan merupakan informasi publik yang wajib tersedia setiap saat. Publikasi putusan melalui direktori putusan Mahkamah Agung bukanlah suatu penghukuman tambahan bagi terpidana sebagaimana pidana pengumuman putusan hakim dalam Pasal 10 KUHP, melainkan bentuk dari keterbukaan informasi publik guna mengoptimalkan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan hal tersebut, penulisan hukum ini mengulas permasalahan yaitu apakah publikasi putusan pengadilan sebagai informasi publik berkedudukan sama dengan pengumuman putusan hakim sebagai pidana tambahan dan bagaimanakah urgensi pidana tambahan pengumuman putusan hakim pasca penyelenggaraan sistem publikasi putusan melalui direktori putusan Mahkamah Agung. Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik analisis bahan hukumnya dianalisis secara *Content Analysis* (analisis isi) serta penulisan hukum ini yang menggunakan tipe penelitian preskriptif. Sebagaimana hasil penelitian, publikasi putusan melalui direktori putusan Mahkamah Agung memiliki kedudukan yang lebih kuat dari pidana pengumuman putusan hakim dikarenakan diatur dalam undang-undang yang lebih baru. Kemudian di era keterbukaan informasi publik, penerapan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim tidak urgen kembali karena putusan wajib untuk dipublikasikan dan merupakan informasi publik yang wajib tersedia setiap saat.

Kata Kunci: Pidana tambahan, pengumuman putusan hakim, direktori putusan

***THE URGENCY OF ADDITIONAL PENAL IN THE FORM OF JUDGE'S
DECISION ANNOUNCEMENT AFTER THE IMPLEMENTATION OF THE
DECISION PUBLICATION SYSTEM THROUGH THE SUPREME COURT'S
DECISION DIRECTORY***

DWI ARMI OKIK ARISSANDI

dwiarmyokik@gmail.com

Mokh. Najih, Ph.D (NIDN. 0017056501)

Dr. Haris Tofly (NIDN. 001307671)

Masters of Law

Directorate Postgraduate Program University of Muhammadiyah Malang

Abstract

Judge's decision announcement is an additional penal that can be imposed to a criminal offender that violates certain criminal offenses. But in the era of public information disclosure, judges' decision is public information that must be published through the Supreme Court's Decision Directory, because the judge's decision is public information that must be available at all times. Publication of decision through the Supreme Court Decision Directory is not an additional penal for convicted person as the judge's decision announcement as regulated in Article 10 of the Criminal Code, but a form of public information disclosure in order to optimize the quality of public services. Based on that matter, this legal writing reviews the issue of whether the publication of a court decision as public information has the same status as the judge's decision announcement as an additional penal and how is the urgency of additional penal in the form of judge's decision announcement after the implementation of the decision publication system through the Supreme Court's Decision Directory. This legal writing using normative juridical research. Legal materials used in this legal writing are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The analysis technique of the legal material is analyzed by Content Analysis and this legal writing using the type of prescriptive research. As the results of the research, decision publication system through the Supreme Court's Decision Directory has a stronger position than the additional penal in the form of judge's decision announcement because it is regulated in a newer law. In the era of public information disclosure, the implementation of additional penal in the form of judge's decision announcement is not urgent because the judge's decision is mandatory to be published and it is public information that must be available at all times.

Keywords: Additional penal, judge's decision announcement, decision directory.

PENDAHULUAN

Pengumuman putusan hakim merupakan salah satu pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP. Sebagai pidana tambahan, penjatuhan pidana pengumuman putusan hakim bersifat fakultatif yaitu hakim dapat memilih untuk menjatuhkan pidana tersebut dan tidak dapat berdiri sendiri namun harus disertai dengan pidana pokok yaitu pidana penjara. Pidana tersebut tidak dapat dijatuhkan terhadap setiap delik, namun hanya dapat dijatuhkan atas delik-delik tertentu sebagaimana ketentuan dalam KUHP yaitu pada Pasal 128 Ayat 3, Pasal 206 ayat 2, Pasal 361, Pasal 377, Pasal 395 dan Pasal 405 ayat (2). Adapun alasan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim hanya dijatuhkan terhadap delik-delik tertentu, menurut Mardjono Reksodiputro, dikarenakan tujuan pidana tersebut dapat mengganggu atau merusak nama baik seseorang, oleh karena itu harus dijatuhkan berdasarkan rumusan delik.¹

Berdasarkan Pasal 43 KUHP, dalam hal hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, maka harus ditetapkan mengenai cara pelaksanaannya dan biaya pengumumannya dibebankan kepada terpidana. Menurut Utrecht, pengumuman putusan hakim sebagai sanksi tambahan adalah publikasi ekstra dengan tujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat agar berhati-hati dengan pelaku kejahatan.² Sebagai contohnya mengumumkan putusan hakim pada media koran dan biayanya ditanggung oleh terpidana.³ Putusannya berupa putusan akhir dan bukanlah putusan sela atau penetapan. Dalam melakukan publikasi ekstra hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan cara pelaksanaannya, seperti melalui plakat atau poster yang ditempel di tempat umum, surat kabar, melalui siaran radio, dan lain-lain.⁴ Namun di era digitalisasi cara publikasi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim yang dilaksanakan melalui surat kabar atau plakat yang ditempel di tempat umum akan kurang efektif dikarenakan sudah tersedianya teknologi yang lebih

¹ Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana: Kumpulan Karangan Buku Keempat*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007), hlm. 64.

² E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah: Hukum Pidana II*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1999), hlm. 341.

³ S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Ahaem Petehaem, 1996), hlm.472.

⁴ *Ibid*, hlm. 340.

modern. Oleh karena itu hakim dapat memilih cara yang lebih modern sesuai dengan perkembangan zaman, agar pidana tersebut berjalan lebih efektif, dan tepat sasaran dari pada harus menggunakan cara yang lama. Seperti memanfaatkan media internet yang dapat melalui website, media sosial atau media internet lainnya agar informasi lebih mudah untuk diakses oleh publik.

Sejak diterbitkannya Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, putusan hakim menjadi suatu kewajiban untuk dipublikasikan karena merupakan informasi publik. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan:

“Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya”

Dalam hal ini putusan-putusan yang merupakan produk badan peradilan diumumkan melalui website direktori putusan agar masyarakat mudah untuk mengaksesnya. Hal tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Mengacu pada ketentuan tersebut bahwa putusan dan penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan informasi yang harus diumumkan oleh setiap pengadilan, dimana tata cara pengumumannya dilakukan melalui situs pengadilan yang bersangkutan. Kemudian untuk menyesuaikan dengan Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Mahkamah Agung merevisi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 diatas menjadi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144 tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, yang menyebutkan bahwa:

“seluruh putusan dan penetapan Pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap baik dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, dan bukan salinan resmi merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik”

Melihat tujuan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim yakni memberitahukan kepada masyarakat mengenai perbuatan yang pernah dilakukan oleh pelaku kejahatan atau terpidana, maka secara esensial publikasi putusan melalui direktori putusan Mahkamah Agung memiliki fungsi yang serupa dikarenakan dengan dilakukannya publikasi melalui direktori putusan Mahkamah Agung, maka putusan

tersebut dapat diakses dan diketahui isinya oleh masyarakat. Publikasi putusan melalui direktori putusan Mahkamah Agung merupakan amanah Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144 tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan bukan merupakan suatu penghukuman tambahan kepada pelaku tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP.

Namun dengan dipublikasikannya putusan melalui direktori putusan Mahkamah Agung, maka putusan tersebut telah diumumkan dan jika ditinjau dari ketentuan KUHP, pengumuman putusan seharusnya merupakan suatu pidana tambahan karena menimbulkan konsekuensi serius bagi terpidana. Sebagaimana pendapat Jan Remmelink yang menyatakan bahwa pidana pengumuman putusan hakim menjadi suatu penderitaan yang serius bagi terpidana karena menyentuh nama baik dan martabatnya.⁵ Dengan demikian muncul suatu problematika hukum mengenai apakah publikasi putusan pengadilan sebagai informasi publik berkedudukan sama dengan pengumuman putusan hakim sebagai pidana tambahan dan bagaimana urgensi pidana tambahan pengumuman putusan hakim pasca penyelenggaraan sistem publikasi putusan melalui direktori putusan Mahkamah Agung.

RUMUSAN MASALAH

1. Apakah publikasi putusan pengadilan sebagai informasi publik berkedudukan sama dengan pengumuman putusan hakim sebagai pidana tambahan?
2. Bagaimana urgensi pidana tambahan pengumuman putusan hakim pasca penyelenggaraan sistem publikasi putusan melalui direktori putusan Mahkamah Agung?

⁵ Jan Remmelink, *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm.505

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Mengenai Pidanaan.

Pemidanaan merupakan langkah terakhir dari rangkaian proses perkara pidana setelah orang yang didakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana dan dijatuhi pidana, oleh karenanya statusnya berubah menjadi terpidana. Pemidanaan diidentikkan dengan sebuah sanksi atau penghukuman bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana yakni melanggar suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Pemidanaan diartikan ketika seorang hakim telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang terbukti bersalah sebagaimana dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan. Wijayanto dan Ridwan Zachrie menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:⁶

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pemidanaan tanpa adanya tujuan sama halnya dengan hukum ditegakkan tanpa arah, dikarenakan pemidanaan merupakan bagian dari penegakan hukum yakni bagian akhir dari rangkaian suatu penegakan hukum. Dengan demikian beberapa para ahli hukum merumuskan suatu tujuan pemidanaan, oleh karenanya hakim selaku pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan pidana memiliki referensi tujuan dalam menjatuhkan pidana yang dapat merujuk pada pendapat para ahli hukum tersebut serta

⁶ Wijayanto dan Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 840.

mempertimbangkan dari aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Selanjutnya secara umum teori pembedaan dibagi menjadi tiga jenis, antara lain:

1. Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedaannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedangkan pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder.⁷ Sebagaimana pendapat dari Immanuel Kant dalam bukunya *Philosophy of Law*, menyebutkan bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat.⁸

Berdasarkan kedua pendapat di atas, menyimpulkan pidana yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana bertujuan agar si pelaku mendapatkan pembalasan dari apa yang telah diperbuatnya, tidak melihat sisi lain seperti untuk memperbaiki diri pelaku. Pembedaan dianggap adil, jika perbuatan pelaku dibalas oleh sanksi pidana sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan. Oleh karenanya melalui mekanisme pemberian sanksi pidana sebagai sarana untuk mewujudkan pembalasan dendam atas perbuatan pelaku tindak pidana.

2. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif ini berbeda dengan teori sebelumnya, dimana pada teori sebelumnya yakni teori pembalasan tujuan pembedaan sebagai sarana untuk balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Dalam teori relatif pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya untuk memperbaiki diri pelaku agar insyaf dan tidak melakukan tindak pidana kembali setelah menjalani masa pidananya.

⁷ Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, (Jambi: Fakultas Hukum Universitas Jambi), hlm. 67

⁸ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 11.

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.⁹ Tujuan pembedaan sebagaimana pendapat di atas yakni terhadap diri pelaku tindak pidana yakni supaya sadar dan menjadi manusia yang lebih baik, juga bertujuan untuk menjaga serta melindungi masyarakat. Apabila dikaitkan antara satu tujuan dengan tujuan selanjutnya, maka dapat disimpulkan bahwa dengan menjadikan pelaku tindak pidana menjadi pribadi yang baik dalam arti tidak melakukan tindak pidana kembali setelah selesai masa pidananya, maka secara langsung berdampak pada perlindungan terhadap masyarakat disekitar pelaku tersebut tinggal dan berada. Masyarakat tidak menjadi khawatir terhadap perbuatan pelaku setelah keluar dari lembaga kemasyarakatan dikarenakan pelaku sudah menginsyafi perbuatannya.

Tujuan pembedaan dalam teori ini dibagi menjadi dua bagian yakni prevensi umum (*generale preventie*) dan prevensi khusus (*speciale preventie*). Mengenai prevensi umum dan khusus tersebut, E. Utrecht menuliskan bahwa prevensi umum bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar, sedangkan prevensi khusus bertujuan menghindarkan supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar¹⁰. Sesuai dengan pendapat E. Utrecht di atas, teori prevensi umum lebih menitik beratkan tujuan pembedaan untuk masyarakat, yakni dengan adanya dijatuhkannya pidana terhadap pelaku tindak pidana, maka dapat sebagai pengingat kepada masyarakat bahwa dilarang melakukan tindak pidana tersebut yang dilakukan oleh pelaku sehingga masyarakat akan lebih menjaga ketertiban. Hal semacam ini merupakan langkah preventif agar tidak terjadi kejahatan-kejahatan lain yang lebih luas. Kemudian teori prevensi umum lebih menitik beratkan tujuan pembedaan untuk diri pelaku tindak pidana yang bersangkutan, yakni agar dapat memperbaiki diri pelaku sehingga pelaku sadar, tidak mengulangi perbuatannya kembali dan menjadi manusia yang lebih baik.

⁹ Zainal Abidin Farid, *op.cit.*, hlm. 11.

¹⁰ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Universitas Jakarta, 1958), hlm. 157.

3. Teori Gabungan/modern (*Verenigings Theorien*)

Teori ini merupakan gabungan dari kedua teori di atas yakni teori absolut dan teori relatif. Dalam teori gabungan, pemidanaan selain bertujuan sebagai pembalasan juga untuk melakukan pencegahan agar suatu kejahatan tidak terulang lagi sehingga menciptakan ketertiban dan keamanan di dalam lingkungan masyarakat. Menurut Van Bemmelen yang menganut teori gabungan (Andi Hamzah, 2005: 36), ia menyatakan pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat¹¹

Tujuan pengenaan sanksi pidana dipengaruhi oleh alasan yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuan pidana, dalam konteks ini alasan pemidanaan adalah pembalasan, kemanfaatan, dan gabungan antara pembalasan yang memiliki tujuan atau pembalasan yang diberikan kepada pelaku dengan maksud dan tujuan tertentu.¹² Dengan demikian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pelaku kejahatan tentunya mempertimbangkan selain dari segi pembalasan agar pelaku jera, juga memperhatikan tujuan lain yakni kemanfaatannya secara luas serta perbaikan diri pelaku.

4. Teori Integratif

Teori ini lebih menekankan pada diperlukannya sebuah sistem untuk mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*). Tujuan pemidanaan didasarkan pada alasan sosiologis, ideologis, dan yuridis. Menurut Muladi tujuan pemidanaan haruslah bersifat integratif, yaitu:¹³

- a. Perlindungan masyarakat;
- b. Memelihara solidaritas masyarakat;

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

- c. Pencegahan (umum dan khusus);
- d. Pengimbalan/pengimbangan.

Maksud dari alasan sosiologis di atas, dengan dijatuhkannya suatu pidana terhadap pelaku tindak pidana mampu memberikan dampak terhadap pengetahuan masyarakat akan sanksi serta konsekuensi yang diterima terpidana tersebut. Dengan demikian informasi dan pengetahuan tersebut juga sebagai pengingat terhadap masyarakat untuk menerapkan ketertiban hukum. Selain itu dengan diterapkannya pemidanaan terhadap pelaku masyarakat akan merasa lebih aman dan diharapkan orang lain tidak akan melakukan hal yang sama atau tindak pidana lainnya. Kemudian pemidanaan sebagai alasan ideologis, maka konsep pemidanaan harus selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang merupakan norma dasar (*grandnorm*) di Indonesia.

Selain itu pemidanaan didasarkan pada alasan yuridis, dalam hal ini Muladi Muladi menyetujui pendapat Herbert L. Packer bahwa Hanya ada dua tujuan utama dari pemidanaan, yakni pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan. Teori pemidanaan yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral tujuan-tujuan pemidanaan, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pemidanaan tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh. Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pemidanaan bersifat definitif, maka teori pemidanaan yang bersifat integratif ini meninjau tujuan pemidanaan tersebut dari segala perspektif. Pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang diselesaikan, karena mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan.¹⁴

Tinjauan Umum Pengumuman Putusan Hakim.

Pengumuman putusan hakim adalah salah satu pidana tambahan sebagaimana diatur Pasal 10 KUHP. Sebagaimana pendapat Utrecht, pengumuman putusan hakim sebagai sanksi tambahan adalah publikasi ekstra dengan tujuan untuk memberitahukan

¹⁴ *Ibid.*

kepada masyarakat agar berhati-hati dengan pelaku kejahatan.¹⁵ Sebagai contohnya pengumuman putusan dapat dilaksanakan melalui koran yang biayanya dibebankan kepada terpidana.¹⁶ Kemudian dalam hal hakim menjatuhkan pidana putusan hakim, maka harus disebutkan cara melaksanakannya sebagaimana bunyi pasal 43 KUHP menyebutkan:

“Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana”

Dalam menentukan cara pelaksanaan putusan hakim, maka haruslah memilih cara yang paling efektif dan efisien serta tepat sasaran. Jika dilihat dari tujuannya, putusan hakim diumumkan agar informasi mengenai putusan tersebut tersampaikan kepada publik sehingga cara melaksanakannya harusnya juga disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada. Ketentuan Pasal 43 KUHP di atas dipengaruhi oleh *Article 36 WvS* dari Belanda yang menyebutkan bahwa pengumuman putusan hakim merupakan sanksi atau hukuman tambahan yang memungkinkan publisikasi lebih besar (ekstra) dan telah ditentukan tindak pidananya dengan melihat sifat kejahatannya bukan sifat hukumannya serta biaya publikasi ditanggung oleh terpidana.¹⁷

Dengan putusan tersebut diumumkan secara ekstra, maka akan berdampak pada nama baik pelaku karena apabila sudah diumumkan pelaku akan menjadi perhatian

¹⁵ Mr. Drs. E. Utrecht, *op.cit.*, hlm. 341.

¹⁶ Sianturi, *op.cit.*, hlm.472.

¹⁷ **Memorie van Toelichting Art 36 WvS** : *De behandeling van strafgedingen geschiedt in den regel ter openbare terechtzitting en de uitspraak der vonnissen moet zonder eenige uitzondering in het openbaar plaats hebben (artt. 156 gw., 20 regt. org.). Intusschen is het meermalen noodig of wenschelijk, dat aan het veroordeelend vonnis eene grootere openbaarheid worde gegeven dan het door de uitspraak "met open deuren" erlangt. Of dit het geval is, moet alleen de aard van het misdrijf, niet de aard der door den regter opgelegde straf beslissen. De openbaarmaking zelve heeft dus in het strafstelsel van het ontwerp het karakter een er bijkomende straf, door den regter uit te spreken in de door de wet aangewezen gevallen met bepaling der wijze waarop zij plaats heeft. De kosten der publicatie komen ten laste van den veroordeelde.* Terjemahan bebasnya adalah **Explanatory Memorandum Art. 36 Code Penal**: *The treatment of criminal proceedings shall be made a rule in open court and the verdict of judgments must without exception in public take place (Art. 156 gw., 20 justice. Org.). Meanwhile, on several occasions necessary or desirable, it may be a greater publicity given to the condemning sentence than the sentence "open doors" obtains. Whether this is the case, only the nature of the crime, not the nature of the penalty imposed by the judge decide. The disclosure itself thus in the penal system of the character design is an additional punishment, by saying the judge in the cases designated by law to determine the manner in which it takes place. The cost of publication shall be borne by the offende.*

masyarakat bahwa yang bersangkutan adalah penjahat. Publikasi secara ekstra melalui media-media, maka label penjahat terhadap sudah tertanam dalam benak masyarakat dan pada saat pelaku tindak pidana telah selesai menjalani masa pidananya akan sulit untuk diterima kembali dalam masyarakat sebagai orang yang baru atau bersih. Sebagaimana pendapat Jan Remmelink bahwa jika dilihat dari sudut pandang terpidana dengan dijatuhkannya pidana pengumuman putusan hakim menjadi suatu penderitaan yang serius bagi terpidana karena menyentuh nama baik dan martabatnya.¹⁸

Di sisi lainnya dengan dijatuhkannya pidana pengumuman putusan hakim akan membantu masyarakat terhindar dari kelihaihan busuk pelaku atau kesembronoan pelaku kejahatan yang dapat merugikan korban.¹⁹ Melihat pendapatnya Jan Remmelink, maka tujuan dari pidana pengumuman putusan hakim lebih kepada agar menderitakan pelaku kejahatan dengan mencoreng nama baik, harkat dan martabatnya sehingga terdapat efek jera untuk melakukan tindak pidana kembali. Selain itu hal yang perlu diperhatikan adalah dengan adanya pengumuman putusan hakim tersebut berdampak kepada keluarga pelaku tindak pidana. Hal yang lebih ditakutkan adalah ketika masyarakat ikut mengucilkan dan memandang negatif terhadap keluarga pelaku tindak pidana. Oleh karenanya dalam hal pidana pengumuman putusan hakim dijatuhkan, maka perlu dilakukan upaya untuk melindungi keluarga pelaku tindak pidana agar tidak dirugikan, sehingga hal tersebut tidak dibiarkan liar begitu saja.

Sebagaimana pendapat Mardjono Reksodiputro, dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, maka hakim hanya perlu mempertimbangkan sesuai dengan ketentuan rumusan delik sebagaimana diatur dalam KUHP, dikarenakan apabila pidana tersebut dijatuhkan dapat merusak nama baik seseorang.²⁰ Berdasarkan ketentuan yang di atur dalam KUHP, tidak semua delik dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, namun hanya delik-delik tertentu. Adapun delik-delik yang dapat dijatuhi pidana tambahan pengumuman putusan hakim adalah sebagai berikut:

¹⁸ Jan Remmelink, *op.cit.*, hlm. 505.

¹⁹ S.R.Sianturi, *op.cit.*, hlm. 472.

²⁰ Mardjono Reksodiputro, *op.cit.*, hlm.64.

- a. Ketentuan Pasal 128 Ayat 3, merupakan pemidanaan atas tindak pidana yang diatur dalam Pasal 127 KUHP mengenai kejahatan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang untuk keperluan Angkatan Laut atau Angkatan Darat;
- b. Ketentuan Pasal 206 ayat 2, merupakan pemidanaan atas tindak pidana yang diatur dalam Pasal 204 dan 205 KUHP yaitu tentang kejahatan dalam melakukan penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan, baik dilakukan secara sengaja atau karena kealpaan;
- c. Ketentuan Pasal 361, merupakan pemidanaan atas tindak pidana yang diatur dalam Bab XXI tentang suatu perbuatan yang menyebabkan orang mati atau luka-luka karena kealpaan serta yang dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencaharian sebagaimana Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP);
- d. Ketentuan Pasal 377, merupakan pemidanaan atas tindak pidana yang diatur dalam Pasal 372, 374, dan 375 KUHP tentang penggelapan;
- e. Ketentuan Pasal 395, merupakan pemidanaan atas tindak pidana yang diatur dalam Bab XXV tentang kejahatan perbuatan curang;
- f. Ketentuan Pasal 504, merupakan kejahatan dengan melakukan suatu tindakan yang merugikan pemiutang;

Dengan demikian delik-delik yang diatur dalam ketentuan pasal yang diuraikan di atas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim. Hakim dapat memilih apakah perlu untuk dijatuhkan atau tidak, karena sebagaimana bunyi pasal tidak ada klausul yang mewajibkan namun seluruh pasal menggunakan kata “dapat” sehingga dapat memilih. Hakim dalam menjatuhkan perlu untuk mempertimbangkan dengan matang mengenai dampak serta kesesuaiannya dengan tujuan pemidanaan yang ideal.

Namun demikian pada implementasinya hakim hanya menerapkan pidana penjara untuk menghukum terdakwa yang melanggar delik dalam pasal di atas. Sebagaimana hasil penelitian LeIP (Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, menyebutkan bahwa pidana pengumuman putusan hakim belum pernah

diterapkan oleh hakim di Indonesia, dan belum pernah adanya suatu pembahasan yang mendalam mengenai hukuman tersebut.²¹ Oleh karena itu timbul suatu pertanyaan, apakah pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim masih relevan untuk diterapkan di Indonesia dan apakah sesuai dengan tujuan pemidanaan yang ideal pada saat ini, tentunya akan menjadi suatu pembahasan baru yang meranik untuk dikaji dan diteliti kedepannya.

Tinjauan Umum Mengenai Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*) yang meninjau dari sudut yuridis, asas keadilan hukum (*gerechtigheid*) yang meninjau dari sudut filosofis, dan asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid atadoelmatigheid* atau *utility*)²².

1. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum memiliki tujuan yakni agar hukum menjadi sesuatu yang jelas dan konkrit. Masyarakat memiliki standarisasi mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh berdasarkan hukum yang pasti. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²³

Hukum yang diatur secara pasti membuat masyarakat memandang suatu hukum sesuai dengan segala yang diatur secara tertulis. Masyarakat akan menyesuaikan dengan batasan dalam aturan-aturan tersebut untuk menentukan

²¹ Nindya Wulandari, Pidana tambahan pengumuman putusan hakim di Indonesia dan Prancis, diakses di <http://leip.or.id/pidana-tambahan-pengumuman-putusan-hakim-di-Indonesia-dan-Prancis/> pada tanggal 12 Desember 2019

²² Dwika, *Keadilan Dari Dimensi Sistem Hukum*, <http://hukum.kompasiana.com>, diakses pada 21 Januari 2020.

²³ Riduan Syahrani, *rangkuman intisari ilmu hukum*, (Bandung, penerbit Citra Aditya Bakti, 1999) hlm. 23.

perbuatan mana yang boleh dan tidak boleh, agar tidak mendapat sanksi hukum apabila melanggar. Hal tersebut memiliki celah, dalam hal suatu perbuatan yang menurut nilai-nilai dalam masyarakat adalah salah, namun perbuatan tersebut belum diatur. Dikarenakan masyarakat memandang hal tersebut belum diatur, maka dianggapnya boleh dilakukan walaupun sebenarnya perbuatan tersebut keliru.

Pidana tambahan berupa putusan hakim telah diatur secara jelas dalam ketentuan KUHP. Delik-delik yang dapat dijatuhi pidana tambahan berupa putusan hakim telah ditentukan berdasarkan sifat kejahatannya antara lain dalam Pasal 128 Ayat 3, Pasal 206 ayat 2, Pasal 361, Pasal 377, Pasal 395 dan Pasal 405 ayat (2). Dengan diaturnya secara nyata dalam ketentuan KUHP, maka pidana tambahan berupa putusan hakim sejalan dengan asas kepastian hukum, yang mana hukum diatur secara konkrit dalam suatu aturan.

2. Asas Kemanfaatan

Asas ini memandang hukum yang baik dan ideal adalah hukum yang memberikan kemanfaatan. Sebagaimana pendapatnya Jeremy Bentham sebagaimana dikutip oleh Mohamad Aunurrohm mengatakan, “hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang.”²⁴ Dalam hal dikaitkan dengan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, yang menjadi pertanyaan adalah apakah pidana tersebut memberikan manfaat secara luas ataupun tidak. Tujuan pidana pengumuman putusan hakim, adalah agar pelaku diketahui oleh publik sebagai pelaku tindak pidana agar masyarakat berhati-hati dengan pelaku.

Hal tersebut tentunya merugikan diri pelaku serta tidak memberikan kemanfaatan terhadapnya, namun masyarakat menjadi tahu informasi atas kejahatan pelaku. Dengan masyarakat tahu mengenai pelaku, apakah itu yang disebut dengan kemanfaatan hukum. Menurut penulis kemanfaatan hukum yang sebenarnya adalah apabila pelaku setelah selesai menjalani masa pidananya, tidak melakukan tindak

²⁴ Mohamad Aunurrohm, “*Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia*” diakses di <http://www.academia.edu.com> diakses 9 Desember 2016, hlm. 7.

pidana kembali sehingga ketertiban dan keamanan terjamin. Hal tersebut lebih bermanfaat dari pada harus mengumumkan pelaku untuk diketahui publik. Dengan mengumumkan kejahatan pelaku, dapat menjadi suatu bomerang apabila pelaku merasa dirinya sudah dilabeli penjahat sehingga pelaku merasa putus asa berbuat baik dan menjadi gelap mata sehingga melakukan kejahatan kembali karena telah dilabeli penjahat oleh masyarakat.

3. Asas Keadilan

Salah satu penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadilan. Adil adalah menempatkan sesuatu sesuai pada tempat yang seharusnya. Belum tentu diberikan suatu porsi yang sama dikatakan adil, karena berbicara mengenai keadilan merupakan menempatkan dengan penuh kesadaran dan kebijaksanaan agar tepat sesuai tempatnya walaupun tidak selalu sama. Menurut L.J Van Apeldoorn mengatakan bahwa, "keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama."²⁵ Kemudian Menurut Fence M. Wantu mengatakan, "adil pada hakekatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*)."²⁶

Penerapan pidana tambahan pengumuman putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana apakah telah sesuai dengan asas keadilan. Hal tersebut dilihat dari tingkat kejahatan pelaku. Hakim perlu mempertimbangkan konsekuensi, alasan serta dampaknya untuk menerapkan pidana tersebut sehingga pidana yang dijatuhkan tepat sesuai porsinya. Asas keadilan sangat erat hubungannya dengan asas *equality before the law*, oleh karenanya disparitas hukum terhadap tindak pidana yang sama kualitasnya terhadap pelaku yang berbeda perlu untuk dihindari. Karena kedua asas ini saling berkesinambungan.

²⁵ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, (Jakarta: Pradnya Paramita 1993), hal. 11.

²⁶ Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, (Gorontalo: Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 Nomor 3, September, 2012), hlm. 484.

Tinjauan Umum tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari sebuah negara demokratis seperti Indonesia. Dikarenakan dengan adanya keterbukaan informasi publik maka dapat mengoptimalkan pengawasan masyarakat terhadap badan publik, dimana dalam negara demokrasi kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Secara internasional hak atas informasi merupakan salah satu hak yang diakui, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Deklarasi Universal HAM PBB yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan mengemukakan pendapat dan gagasan; hak ini mencakup hak untuk memegang pendapat tanpa campur tangan, dan mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan gagasan melalui media apapun tanpa mempertimbangkan garis batas negara.”

Dalam konstitusi negara Indonesia juga telah menjamin bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan informasi. Sebagaimana Pasal 28 F Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Dengan demikian akses dalam mendapatkan informasi secara mudah dan sederhana perlu untuk difasilitasi oleh negara sebagai bentuk pelayanan publik. Kemudian sebagaimana Pasal 2 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Undang Undang KIP) yang disebut informasi publik adalah sebagai berikut:

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”.

Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan

keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.²⁷

Tujuan dan asas keterbukaan informasi publik Undang Undang KIP pada dasarnya adalah memberikan arah, landasan, acuan dan jaminan tentang pemenuhan hak publik atas informasi yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang Undang KIP ini dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁸

Dalam lingkungan pengadilan keterbukaan informasi dioptimalkan yakni dengan diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Setelah Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, berlaku di lingkungan Mahkamah Agung, kemudian terbit dan disahkan Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dikarenakan terdapat undang undang tersebut untuk menyesuaikannya, maka Mahkamah Agung merevisi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 diatas menjadi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144 tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (SK KMA Nomor 1-114 tentang PPID).

Berdasarkan ketentuan SK KMA Nomor 1-114 tentang PPID, informasi dalam pelayanana di lingkup pengadilan dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

- a. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
- b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik; dan
- c. Informasi yang dikecualikan

²⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ditetapkan di Jakarta tanggal 30 April 2008, Lembaran Negara RI Nomor 61, tahun 2008 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846 Tahun 2008, bagian Penjelasan Umum

²⁸ N.G.B. Mandica-Nur, *Panduan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Untuk Petugas Pengelola dan Pemberi Informasi di Badan Publik*, (IRDI dan USAID, Cetakan Pertama, 2009), hlm. 7

Putusan hakim merupakan jenis informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik. Sebelum diterbitkannya SK KMA Nomor 1-114/2011 tentang PPID, putusan dan penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan adalah informasi yang wajib diumumkan dengan cara memasukkan ke dalam situs pengadilan yang bersangkutan, hal tersebut sebagaimana di atur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 di atas, maka pada tahun yang sama Mahkamah Agung menerbitkan sistem publikasi putusan berbasis internet melalui website direktori putusan Mahkamah Agung. Namun masih terdapat keterbatasan mengenai putusan yang di upload melalui website pada saat itu yakni hanyalah putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung. Maksud dari Direktori Putusan sebagai di atas adalah kumpulan putusan-putusan seluruh badan peradilan dibawah naungan mahkamah agung republik indonesia. Seluruh putusan tersebut meliputi Peradilan Negeri, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.²⁹

Kemudian pada tahun berikutnya telah terbit dan disahkan Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang undang tersebut terbit sebagai optimalisasi keterbukaan informasi publik yang berdampak pada kualitas pelayanan publik. Mengenai putusan hakim pada undang-undang tersebut di atur secara eksplisit pada Pasal 11 ayat (1) huruf b menyebutkan:

“ Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya”.

Oleh karenanya masyarakat untuk memperoleh putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim dapat mengakses pada website direktori putusan mahkamah agung. Setelah diterbitkannya Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Mahkamah Agung bertindak cepat untuk merevisi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 diatas menjadi SK KMA Nomor 1-114/2011 tentang PPID dengan tujuan agar menyesuaikan dengan undang undang

²⁹ Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, https://ptun-jakarta.go.id/?page_id=116, diakses pada tanggal 2 Februari 2020.

tersebut. Adapun keterbukaan informasi publik mengenai putusan hakim, diatur dalam SK KMA Nomor 1-114/2011 tentang PPID menyebutkan sebagai berikut:

“seluruh putusan dan penetapan Pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap baik dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, dan bukan salinan resmi merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik”

Berdasarkan ketentuan di atas, untuk mengoptimalkan pelayanan keterbukaan informasi publik maka hakim setelah menjatuhkan putusan mempunyai kewajiban untuk mengupload putusannya pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perakara (SIPP) pengadilan yang bersangkutan, kemudian putusan yang di upload oleh hakim tersebut dipublikasikan oleh Mahkamah Agung melalui website direktori putusan Mahkamah Agung.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.³⁰ Penelitian hukum yang disusun ini merupakan penelitian yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka atau yang dinamakan sebagai data sekunder. Penelitian yang diperoleh dari bahan pustaka disebut sebagai penelitian hukum normatif. Sehingga penelitian hukum ini adalah adalah penelitian hukum normatif.

Sebagaimana pendapat yang diutarakan oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³¹ Disamping itu juga dikenal pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu mengulas sinkronisasi perundang-undangannya yang

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: CV Rajawali 1985), hlm.14

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 133.

terkait baik secara horizontal maupun vertikal. Dalam penelitian hukum ini harmoniasi dan sinkronisasi perundang-undangan yang menjadi suatu kajian antara lain KUHP, Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA Nomor 1-114/2011 tentang PPID serta peraturan lainnya yang terkait. Selain itu pada penulisan hukum ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni berdasarkan pada asas hukum, konsep atau doktrin-doktrin hukum yang relevan untuk membangun sebuah argumentasi hukum dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam penulisan hukum ini.

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu bahan hukum primer yang berupa peraturan perundangan yang terkait, bahan hukum sekunder berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, buku-buku para ahli/pakar hukum, jurnal-jurnal hukum dan bahan hukum tersier berupa kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum komptemporer dan direktori pengadilan. Teknik analisis bahan hukum pada penulisan hukum ini dianalisis secara *Content Analysis* (analisis isi) yaitu metode untuk memahami sebuah arti tulisan atau teks atau pesan yang akan disampaikan oleh teks tersebut, setelah memahaminya kemudian dilakukan analisis isi teks tersebut sesuai dengan permasalahan hukum yang dihadapi.

Sedangkan tipe penulisan hukum ini adalah tipe penelitian preskriptif analisis, yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.³² Sebagaimana di atas bahwa penulisan hukum hukum ini yang menggunakan tipe penelitian preskriptif yakni melakukan analisis terhadap isu hukum yang sedang diangkat melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Setelah melakukan kedua pendekatan di atas, kemudian penulis menarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum yang sedang diangkat yang pada akhirnya penulis memberikan preskripsi atas isu hukum tersebut.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, Hlm 22

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan antara Publikasi Putusan Pengadilan sebagai Informasi Publik dengan Pengumuman Putusan Hakim sebagai Pidana Tambahan.

1. Kedudukan Pidana Tambahan berupa Pengumuman Putusan Hakim

Berdasarkan Pasal 10 KUHP, pengumuman putusan hakim merupakan salah satu jenis pidana tambahan. Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim hanya dijatuhkan terhadap delik-delik tertentu dalam KUHP dan sifat penjatuhan pidananya adalah fakultatif, sehingga hakim dapat menjatuhkannya terhadap delik yang telah ditentukan tersebut. Penjatuhan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim tidak dapat berdiri sendiri, oleh karena penjatuhannya bersamaan dengan pidana pokoknya yakni pidana penjara.

Sebagaimana ketentuan Pasal 43 KUHP, dalam hal hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, maka hakim tersebut harus menetapkan cara pelaksanaan pengumuman putusan tersebut. Kemudian seluruh biaya dari pelaksanaan putusan yang ditetapkan oleh hakim tersebut di atas dibebankan oleh terpidana. Oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana tersebut hakim perlu melihat dan mempertimbangkan kondisi terpidana, yakni apakah terpidana mampu untuk menanggung beban biaya tersebut.

Dikarenakan untuk menghindari disaat sudah dijatuhkan pidana pengumuman putusan hakim dan ditetapkan cara pelaksanaannya, namun terpidana secara ekonomi kondisinya tidak mampu membiayainya sehingga pelaksanaan putusan pidana tersebut tidak dapat terlaksana. Sebagaimana dengan *Article 36 WvS* dari Belanda yang menyebutkan bahwa pengumuman putusan hakim merupakan sanksi atau hukuman tambahan yang memungkinkan publisikasi lebih besar (ekstra) dan telah ditentukan tindak pidananya dengan melihat sifat kejahatannya bukan sifat hukumannya serta biaya publikasi ditanggung oleh terpidana.³³

³³ Memorie van Toelichting, *op.cit*, Art 36 WvS.

Kemudian Utrecht berpendapat, bahwa pengumuman putusan hakim sebagai sanksi tambahan adalah publikasi ekstra dengan tujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat agar berhati-hati dengan pelaku kejahatan.³⁴ Dalam melakukan publikasi ekstra hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan cara pelaksanaannya, seperti melalui plakat atau poster yang ditempel di tempat umum, surat kabar, melalui siaran radio, dan lain-lain.³⁵ Selain itu Jan Remmelink berpendapat bahwa pengumuman putusan hakim merupakan suatu penderitaan serius karena telah menyentuh nama baik dan martabat terpidana.³⁶ Dengan demikian dalam menerapkan pidana tersebut harus dengan penuh kehati-hatian dan pertimbangan yang matang. Dilihat dari sudut pandang masyarakat, maka pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perbuatan pelaku kejahatan.

Sebagaimana pendapatnya Sianturi, dengan dijatuhkannya pidana pengumuman putusan hakim maka akan membantu masyarakat untuk dapat melakukan antisipasi dari kelihaian busuk pelaku dalam melakukan kejahatannya.³⁷ Setelah masyarakat mengetahui mengenai perbuatan pelaku, tentunya masyarakat akan memberikan label terhadap pelaku kejahatan. Hal tersebut akan menjadi hukuman yang berat bagi pelaku, karena disamping pidana yang harus dijalani, martabat pelaku juga telah tercoreng dikarenakan telah diketahui oleh masyarakat luas. Setelah pelaku tindak pidana selesai menjalani masa pidananya, label tersebut dimungkinkan masih melekat kepada pelaku, sehingga meskipun pelaku telah bertobat atau insyaf maka tetap dilabeli sebagai penjahat oleh masyarakat.

Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan terhadap delik-delik tertentu sebagaimana diatur dalam KUHP. Alasan pengaturan mengenai pidana pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan terhadap delik-delik tertentu sebagaimana ketentuan yang diuraikan di atas, dikarenakan pidana tersebut berdampak kepada pelaku yakni merusak martabat dan nama

³⁴ E.Utrecht, *op.cit.*, hlm. 341.

³⁵ *Ibid.*, hlm.340.

³⁶ Jan Remmelink, *op.cit.*, hlm.505.

³⁷ S.R.Sianturi, *op.cit.*, hlm. 472.

baiknya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Mardjono Reksodiputro yang menyatakan bahwa karena tujuannya yang dapat ‘mengganggu atau merusak’ nama baik seseorang dalam masyarakat, maka pidana tambahan ini hanya dapat dipertimbangkan oleh hakim apabila memang hal tersebut diancamkan dalam rumusan tindak pidana.³⁸

Sebagaimana penjelasan-penjelasan di atas yakni mengenai pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Dasar hukumnya yaitu ketentuan dalam KUHP;
- b. Merupakan salah satu jenis pidana tambahan;
- c. Bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat;
- d. Tujuannya sebagai penghukuman kepada pelaku tindak pidana;
- e. Cara pelaksanaan pengumumannya ditentukan oleh hakim yang memutuskan;
- f. Pengumumannya dibiayai oleh terpidana.
- g. Hanya dijatuhkan terhadap delik-delik tertentu.

2. Kedudukan Publikasi Putusan Melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Undang Undang KIP), menjadikan dasar bahwa keterbukaan informasi publik merupakan hal yang perlu diprioritaskan untuk penyelenggaraan negara yang baik. Hal tersebut sejalan dengan ciri negara demokratis, yang mana keterbukaan informasi publik sebagai bentuk pengawasan publik terhadap penyelenggara negara dan badan publik lainnya.

Putusan pengadilan merupakan salah satu informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, baik putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap, baik dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, dan bukan salinan resmi sehingga putusan tersebut dapat diakses oleh

³⁸ Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana: Kumpulan Karangan Buku Keempat*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2007), hlm.64

publik, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang Undang KIP juncto SK KMA Nomor 1-114/2011 tentang PPID. Dalam menjalankan amanah peraturan tersebut, Mahkamah Agung meluncurkan website direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sehingga putusan dapat diakses oleh publik melalui internet dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses suatu putusan.

Dengan diselenggarakannya publikasi putusan pengadilan melalui direktori putusan, maka secara esensial putusan tersebut telah diumumkan ke publik sehingga masyarakat yang mengakses putusan mengetahui isi putusan termasuk pelaku tindak pidana dan tindak pidana yang dilakukannya. Namun publikasi putusan pengadilan melalui direktori putusan Mahkamah Agung bukanlah suatu penghukuman pidana tambahan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan KUHP. Publikasi putusan melalui direktori putusan Mahkamah Agung semata-mata bertujuan untuk pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagaimana Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP juncto SK KMA Nomor 1-114/2011 tentang PPID.

Mengacu pada penjelasan-penjelasan di atas, apabila dibandingkan antara pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dengan publikasi putusan melalui direktori putusan Mahkamah Agung, keduanya memiliki kedudukan masing-masing yakni sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan kedudukan antara pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dengan publikasi putusan melalui direktori putusan Mahkamah Agung

| No | Pidana Tambahan Berupa Pengumuman Putusan Hakim | Publikasi Putusan Melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung |
|----|---|---|
| 1 | Dasar hukumnya yaitu pada ketentuan KUHP | Diatur dalam UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Jo. SK KMA No. 1-114/2011 tentang PPID |
| 2 | Merupakan salah satu jenis pidana tambahan; | Bukan merupakan jenis pidana |
| 3 | Tujuannya sebagai penghukuman | Tujuannya untuk mengoptimalkan pelayanan publik khususnya |

| | | |
|---|---|--|
| | kepada pelaku tindak pidana; | mengenai keterbukaan informasi publik |
| 4 | Cara pelaksanaan pengumumannya ditentukan oleh hakim yang memutuskan; | Cara pelaksanaan pengumumannya melalui website direktori putusan Mahkamah Agung |
| 5 | Pengumumannya dibiayai oleh terpidana. | Pengumumannya dibiayai oleh badan publik yang bersangkutan |
| 6 | Hanya dijatuhkan terhadap delik-delik tertentu | Pengumumannya terhadap semua jenis putusan (putusan yang sifatnya tertutup untuk umum dilakukan anonimisasi putusan) |

Publikasi putusan melalui direktori putusan Mahkamah Agung, walaupun bukan merupakan suatu penghukuman, namun secara esensial memiliki tujuan yang serupa dengan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim yaitu menginformasikan isi putusan kepada publik atau masyarakat. Publikasi putusan yang memanfaatkan internet seperti menggunakan media website situs pengadilan dapat digunakan sebagai cara pelaksanaan pidana tambahan pengumuman putusan hakim.

Walaupun keduanya memiliki tujuan untuk menginformasikan putusan kepada masyarakat, namun memiliki dasar hukum yang berbeda, dimana pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim diatur dalam KUHP, sedangkan Publikasi putusan melalui direktori putusan Mahkamah Agung diatur dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP juncto SK KMA Nomor 1-114/2011 tentang PPID. Dengan demikian kedua peraturan tersebut saling tumpang tindih antara satu dengan lainnya.

Berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan:

a. jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan terdiri atas:

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- (2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - (3) Peraturan Pemerintah;
 - (4) Peraturan Presiden;
 - (5) Peraturan Daerah Provinsi;
 - (6) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ditinjau dari ketentuan di atas, KUHP/Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP. Namun Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP merupakan peraturan yang lebih baru dibandingkan dengan KUHP. Oleh karenanya berdasarkan asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* yakni dalam hal terdapat peraturan yang sederajat, maka peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama. Dengan demikian publikasi putusan melalui direktori putusan Mahkamah Agung sebagaimana amanah Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP juncto SK KMA Nomor 1-114/2011 tentang PPID memiliki kedudukan yang lebih kuat dan diutamakan dalam hal ini. Meskipun publikasi putusan melalui direktori putusan Mahkamah Agung bukanlah suatu penghukuman sebagaimana maksud pengumuman putusan hakim dalam ketentuan KUHP.

Kemudian ditinjau dari asas kemanfaatan, publikasi putusan melalui direktori putusan Mahkamah Agung memberikan manfaat kepada masyarakat yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berdampak kepada masyarakat khususnya terkait mudah diaksesnya suatu putusan oleh masyarakat. Hal tersebut relevan dengan maksud asas ini, dimana hukum harus memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat. Oleh karena itu menjadi suatu pertanyaan, apakah masih urgen dan relevan penerapan pidana tambahan berupa

pengumuman putusan hakim di era keterbukaan informasi publik, hal mana akan dibahas pada pembahasan kedua pada penulisan hukum ini.

Dengan diselenggarakannya publikasi putusan melalui direktori putusan Mahkamah Agung, maka seluruh isi putusan diketahui oleh masyarakat yang mengaksesnya termasuk identitas terdakwa, saksi-saksi yang dihadirkan, tindak pidana yang didakwakan serta penjatuhan pidananya. Namun dalam perkara tertentu yaitu perkara yang sifat persidangannya tertutup untuk umum, seperti perkara pidana khusus anak, pidana kesusilaan, kekerasan dalam rumah tangga dan perkara lainnya yang persidangannya bersifat tertutup untuk umum, maka putusan yang diunggah melalui direktori putusan Mahkamah Agung akan dikaburkan mengenai identitas terdakwa atau terpidana maupun pihak-pihak yang berperkara atau yang disebut dengan anonimisasi putusan, demi melindungi privasi terdakwa atau terpidana maupun pihak-pihak yang berperkara serta untuk menghindari penyalahgunaan informasi. Disamping itu apabila saksi dan korban adalah anak, maka identitasnya juga dikaburkan. Sehingga masyarakat tidak dapat melihat atau mengetahui secara langsung identitas pelaku tindak pidana, saksi serta korban dalam putusan tersebut.

Putusan yang dipublikasikan melalui direktori putusan Mahkamah Agung namun tidak dilakukan anonimisasi akan berpengaruh terhadap nama baik serta harkat dan martabat terpidana bagi yang putusannya sudah berkekuatan hukum tetap atau terdakwa bagi yang putusannya masih dalam proses upaya hukum serta saksi dan korban. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.

Selain itu bertentangan juga dengan asas penghormatan harkat dan martabat manusia sebagaimana diadopsi dalam ketentuan Pasal 5 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan juncto Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan

Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, selain itu bertentangan juga dengan ketentuan Pasal 3 huruf a Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Oleh karena itu, putusan yang dipublikasikan melalui direktori putusan Mahkamah Agung wajib memperhatikan asas-asas dan ketentuan hukum di atas, agar lebih menjamin perlindungan harkat dan martabat terpidana atau terdakwa, saksi dan korban. Dengan demikian dalam mempublikasikan putusan melalui direktori putusan Mahkamah Agung wajib untuk mengkaburkan identitas terpidana atau terdakwa, saksi dan korban.

Urgensi Pidana Tambahan Pengumuman Putusan Hakim Pasca Penyelesaian Sistem Publikasi Putusan Melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung

Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim bertujuan agar putusan tersebut terpublikasikan sehingga masyarakat mengetahui segala informasi mengenai putusan tersebut. Sebagaimana pendapat Utrecht, bahwa pengumuman putusan hakim sebagai sanksi tambahan adalah publikasi ekstra dengan tujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat agar berhati-hati dengan pelaku kejahatan.³⁹ Publikasi ekstra tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara yang telah ditetapkan oleh hakim yang memutus perkara tersebut. Dalam menentukan cara untuk melaksanakan pengumuman putusan hakim, seharusnya disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada yakni dengan memaksimalkan kemajuan teknologi agar lebih efektif dan efisien, seperti memanfaatkan media internet, media televisi, atau media lainnya yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi terpidana karena yang membiayai pengumuman tersebut adalah terpidana.

Mengacu pada ketentuan Pasal 43 KUHP, dalam hal hakim menjatuhkan pidana berupa pengumuman putusan hakim, maka harus ditetapkan cara pelaksanaannya dan biaya pengumuman dibebankan kepada terpidana. Oleh karena itu hakim harus secara jelas menetapkan cara pelaksanaan pengumuman putusan hakim dengan mempertimbangkan kondisi terpidana. Ketentuan Pasal 43 KUHP tersebut sesuai

³⁹ Mr.Drs.E.Utrecht, *op.cit.*, hlm. 341.

dengan *article* 36 WvS dari Belanda. Delik-delik tertentu yang dapat dijatuhi pidana pengumuman putusan hakim dalam KUHP antara lain Pasal 128 ayat 3, Pasal 206 ayat 2, Pasal 361, Pasal 377, Pasal 395 dan Pasal 405 ayat (2). Dengan melihat sifat kejahatan dalam delik tersebut, maka putusan dapat diumumkan ke ranah publik agar diketahui oleh masyarakat dengan tujuan agar masyarakat berhati-hati dengan pelaku tindak pidana. Mengenai cara pelaksanaan pidana pengumuman putusan hakim, Sianturi menyatakan bahwa dalam menerapkan publikasi ekstra hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan cara pelaksanaannya, seperti melalui plakat atau poster yang ditempel di tempat umum, surat kabar, melalui siaran radio, dan lain-lain.⁴⁰ Cara-cara tersebut merupakan cara lama yang mungkin sesuai pada zaman waktu itu, namun di era kemajuan teknologi seperti saat ini, hakim dapat memilih cara yang lebih modern sehingga pengumuman putusan mampu dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, media internet telah menjadi referensi utama dalam mengakses informasi dari pada media cetak seperti koran, majalah dan lain-lain. Hal tersebut sesuai dengan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) yang menyatakan, pengguna internet di Indonesia hingga saat ini telah mencapai 82 juta orang. Dengan capaian tersebut, Indonesia berada pada peringkat ke-8 di dunia.⁴¹ Selain itu dalam mempublikasikan informasi melalui internet lebih dapat menekan biaya dari pada harus melalui media televisi, oleh karenanya dengan memilih cara pengumuman putusan hakim melalui media internet tidak terlalu membebankan terpidana yang dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim. Sebagai contoh pengumuman dapat dipublikasikan dalam website pengadilan yang memutus perkara atau menggunakan media sosial resmi pengadilan yang memutus perkara. Dengan demikian berdasarkan data di atas pemanfaatan teknologi internet dalam menyampaikan informasi putusan hakim,

⁴⁰ Sianturi, *op.cit*, hlm.340.

⁴¹ Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Kominfo Septiana Tangkary dalam sambutannya pada acara Sosialisasi Internet Cerdas, Kreatif dan Produktif (Incakap) yang mengusung tema “Membangun Budaya Internet Sehat dan Aman (INSAN) Menuju Masyarakat Cerdas, Kreatif dan Produktif” kerjasama antara Kementerian Kominfo dengan relawan teknologi informasi dan komunikasi Provinsi Lampung dan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya di Bandar Lampung dalam alama website https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3980/Kemkominfo%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+Capai+82+Juta/0/berita_satker, diakses pada tanggal 19 Februari 2020.

menurut penulis lebih efektif dan efisien dari pada menggunakan media konvensional seperti koran, majalah, tabloid atau media elektronik seperti televisi atau siaran radio.

Namun sejak tahun 2007 Mahkamah Agung telah melakukan publikasi putusan melalui website direktori putusan Mahkamah Agung demi terselenggaranya keterbukaan informasi badan peradilan, dengan berlandaskan pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Dimana ketentuan tersebut menyatakan bahwa putusan dan penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan informasi yang harus diumumkan oleh setiap pengadilan. Kemudian setelahnya pada tahun 2008 disahkan Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b:

“ Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya”.

Berdasarkan undang-undang tersebut, Mahkamah Agung merevisi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 diatas menjadi SK KMA Nomor 1-114/2011 tentang PPID dengan tujuan agar menyesuaikan dengan undang undang tersebut. Adapun keterbukaan informasi publik mengenai putusan hakim, diatur dalam SK KMA Nomor 1-114/2011 tentang PPID menyebutkan sebagai berikut:

“seluruh putusan dan penetapan Pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap baik dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, dan bukan salinan resmi merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik”.

Publikasi putusan yang diamanahkan oleh peraturan-peraturan tersebut tidak sebatas pada delik-delik tertentu seperti delik yang dapat dijatuhi pidana pengumuman putusan hakim, melainkan seluruh perkara yang diputus oleh pengadilan. Masyarakat dapat memperoleh informasi putusan yang telah diputus oleh pengadilan dengan mengakses melalui website direktori putusan Mahkamah Agung. Dengan mengunduh putusan yang telah diputus pada alamat website tersebut, maka masyarakat yang mengunduh tersebut dapat mengetahui isi putusannya antara lain identitas terdakwa atau pihak yang berperkara, tindak pidana yang didakwakannya, pertimbangan hukum, pidana yang dituntut serta amar putusannya. Dengan demikian baik putusan yang

dijatuhi dengan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim ataupun tidak, maka putusan tersebut dapat diketahui oleh publik karena telah dipublikasikan melalui website direktori putusan Mahkamah Agung. Tujuan dari publikasi putusan melalui website direktori putusan Mahkamah Agung adalah untuk keterbukaan dan transparansi informasi publik oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya dan bukanlah sebagai penghukuman tambahan sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Namun secara esensial tujuan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim juga bermaksud agar putusan tersebut dapat diketahui oleh publik dengan cara pelaksanaannya yang ditentukan oleh hakim.

Di era keterbukaan informasi publik, putusan yang merupakan informasi publik sangat mudah diakses oleh masyarakat melalui website direktori putusan Mahkamah Agung dikarenakan putusan merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat, sehingga urgensi dari pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim tidak lagi relevan dengan perkembangan saat ini. Tanpa dijatuhkannya pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, putusan tersebut telah dipublikasikan melalui website direktori putusan Mahkamah Agung yang akan dengan mudah diakses oleh masyarakat.

Berdasarkan penelitian LeIP, penjatuhan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim belum pernah diterapkan di Indonesia.⁴² Hal tersebut dikarenakan sifat penjatuhannya adalah fakultatif sehingga tidak ada suatu kewajiban bagi hakim untuk menjatuhkan pidana tersebut. Dengan keterbukaan informasi publik, maka penjatuhan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim tidaklah terlalu urgen, dikarenakan putusan yang telah diputus oleh hakim sudah wajib untuk dipublikasikan dalam direktori putusan Mahkamah Agung karena berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto SK KMA Nomor 1-114/2011 tentang PPID menyatakan putusan merupakan informasi publik yang wajib tersedia setiap saat sehingga dapat diakses oleh publik.

Kemudian menurut Jan Remmelink menyatakan bahwa pengumuman putusan hakim merupakan penderitaan serius yang dapat mencoreng nama baik dan martabat

⁴² Nindya Wulandari, *op.cit.* hlm. 1.

seseorang.⁴³ Tujuan dari pidana tersebut adalah memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatan yang sama. Karena dengan diumumkannnya putusan, maka lingkungan sekitar akan mengetahuinya dan menjadi pertimbangan masyarakat apabila pelaku kembali bekerja ditengah-tengah masyarakat.⁴⁴ Melihat tujuan dari pidana pengumuman putusan hakim di atas, tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan, yang mana tujuan dari pemasyarakatan adalah agar pelaku menjadi manusia seutuhnya, dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu juga bertentangan dengan tujuan filosofis pemidanaan yang diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana dalam Pasal 54 ayat (2) menyebutkan:

“Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia”

Oleh karena itu, pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim tidak relevan untuk diterapkan sesuai dengan perkembangan hukum saat ini. Dikarenakan dengan diumumkannnya putusan hakim maka label penjahat terhadap pelaku akan melekat yang tentunya menderitakan dan merendahkan martabatnya, sehingga pelaku akan sulit untuk hidup secara wajar dan dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka terdapat beberapa hal pokok yang dapat dijadikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim merupakan salah satu jenis pidana tambahan berdasarkan ketentuan Pasal 10 KUHP yang dapat dijatuhkan terhadap delik-delik tertentu dalam KUHP antara lain Pasal 128 ayat 3, Pasal 206 ayat 2, Pasal 361, Pasal 377, Pasal 395 dan Pasal 405 ayat (2). Sementara publikasi putusan melalui direktori putusan Mahkamah Agung merupakan cara yang

⁴³ Jan Remmelink, *op.cit*, hlm.505.

⁴⁴Nindya Wulandari, *op.cit*. hlm. 1.

dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam menjalankan amanah Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto SK KMA Nomor 1-114/2011 tentang PPID untuk menerapkan keterbukaan informasi publik, dikarenakan putusan merupakan informasi publik yang wajib tersedia setiap saat. Kedudukan publikasi putusan melalui direktori putusan Mahkamah Agung adalah sebagai upaya keterbukaan informasi publik oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya sedangkan pengumuman putusan hakim dalam KUHP sebagai pidana tambahan. Kemudian sebagaimana asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP juncto SK KMA Nomor 1-114/2011 tentang PPID memiliki kedudukan yang lebih kuat dari pada KUHP, oleh karenanya lebih diutamakan. Meskipun demikian, publikasi putusan melalui direktori putusan Mahkamah Agung masih memiliki kekurangan yakni tidak seluruh putusan dilakukan anonimisasi sehingga berpengaruh terhadap harkat dan martabat terdakwa atau terpidana, saksi dan korban. Oleh karena itu, seluruh putusan yang dipublikasikan melalui direktori putusan Mahkamah Agung perlu dilakukan anonimisasi putusan, demi melindungi harkat dan martabat terdakwa atau terpidana, saksi dan korban.

2. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto SK KMA Nomor 1-114/2011 tentang PPID menyatakan putusan merupakan informasi publik yang wajib tersedia setiap saat sehingga dapat diakses oleh publik. Oleh karena itu pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim yang bertujuan agar putusan tersebut diumumkan atau dipublikasikan tidaklah terlalu urgen kembali, dikarenakan putusan hakim baik yang dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim maupun tidak, wajib dipublikasikan melalui website direktori putusan Mahkamah Agung sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses putusan yang telah diputus. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian dari LeIP (Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan) tahun 2016 pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim belum pernah diterapkan, hal tersebut karena penjatuhan pidananya bersifat fakultatif sehingga tidak wajib untuk dijatuhkan oleh hakim. Disamping itu melihat tujuan dijatuhkannya pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim adalah agar

masyarakat mengetahui perbuatannya sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku dan serta bertujuan merendahkan harkat dan martabat pelaku. Hal tersebut tidak sejalan dengan tujuan filosofis pemasyarakatan sebagaimana Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan serta tujuan pemidanaan sebagaimana ketentuan Pasal 54 ayat (2) RKUHP.

SARAN

1. Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim tidak perlu diatur kembali dalam Rancangan Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP), dikarenakan bertentangan dengan tujuan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 54 RKUHP serta konsep filosofis pemidanaan yang berkembang saat ini. Disamping itu di era keterbukaan informasi publik, putusan hakim merupakan informasi publik yang wajib tersedia setiap saat sehingga pengadilan mempunyai kewajiban untuk mempublikasikannya, sebagaimana amanah Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto SK KMA Nomor 1-114/2011 tentang PPID sehingga pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim tidak urgen lagi untuk diterapkan.
2. Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui badan-badan peradilan di bawahnya, perlu melakukan anonimisasi putusan/pengkaburan identitas terpidana atau terdakwa, saksi dan korban terhadap seluruh putusan yang dipublikasikan melalui direktori putusan Mahkamah Agung. Hal tersebut untuk melindungi harkat dan martabat terdakwa atau terpidana, saksi dan korban.
3. Demi meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka publikasi putusan hakim melalui direktori putusan Mahkamah Agung harus dilakukan secara tepat waktu. Oleh karena itu hakim yang memutus perkara harus segera mengunggah putusan tersebut pada situs pengadilan setelah putusan tersebut dibacakan dalam persidangan, serta memperhatikan kualitas putusannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Gunung Agung.
- Farid, Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadiati, Hermin. 1995. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang: Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia.
- Hamzah, Andi. 1991. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Koeswadi. 1995. *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Cet. Pertama. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Lamintang, P.A.F. 1988. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico.
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Mamudji, Sri. et. al. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Muladi dan Barda Nawawi. 1992. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nur, N.G.B. Mandica. 2009. *Panduan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Untuk Petugas Pengelola dan Pemberi Informasi di Badan Publik*. Cetakan Pertama. Jakarta: IRDI dan USAID.
- Prakoso, Djoko. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung : Sumur Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono. 2007. *Pembaharuan Hukum Pidana: Kumpulan Karangan Buku Keempat*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.
- Rimmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sahetapy, J. E. 1979. *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Bandung: Alumni.
- Setiady, Tolib. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabet.
- Sianturi, S. R. 1996. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem.

- Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV Rajawali.
- Sudarto. 1997. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Utrecht, E. 1958. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Universitas Jakarta.
- Utrecht, E. 1999. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Usman. *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*. Jambi: Fakultas Hukum Universitas Jambi.
- Van Apeldoorn, L. J. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum*. Terj. Oetarid Sadino. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Watik, Usman Abdhali. 2010. *Implikasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Peningkatan Pelayanan Publik*. Surabaya: Universitas Kristen Petra.
- Wijayanto dan Ridwan Zachrie. 2009. *Korupsi Mengorupsi Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Jurnal

- Ekomadyo, Agus S. "Prospek Penerapan Metode Analisis Isi (Content Analysis) dalam Penelitian". *Journal Itenas* No. 2 Vol. 10, Agustus, 2006.
- Wantu, Fence M. "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata". *Jurnal Dinamika Hukum*, Gorontalo Vol. 12 Nomor 3, September, 2012.

Makalah

- Mudzakkir. *et. al.* "Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan." Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional).
- Ramli, Ahmad M. "KIP dan *Good Governance*". Makalah pada Seminar Sosialisasi UU KIP. Jakarta. 2009.
- Wulandari, Nindya. "Pidana Tambahan Pengumuman Putusan Hakim di Indonesia dan Prancis". Laporan pada Lembaga Independensi Peradilan. Jakarta. 2016.

Kamus

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. Keempat. Jakarta : Balai Pustaka.
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.

Internet

- "Aristoteles, (384 SM - 322 SM)". <http://id.wikipedia.org/wiki/Aristoteles/keadilan>. Diakses 21 Januari 2020.
- Aunurrohm, Mohamad. "Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia". Diakses 9 Desember 2016.

- Dwika. "Keadilan Dari Dimensi Sistem Hukum". <http://hukum.kompasiana.com>. Diakses 21 Januari 2020.
- Kalo, Syafruddin. "Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat". <http://www.academia.edu.com>. Diakses 30 Desember 2019.
- Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. https://ptun-jakarta.go.id/?page_id=116. Diakses 2 Februari 2020.
- Tangkary, Septriana. "Membangun Budaya Internet Sehat dan Aman (INSAN) Menuju Masyarakat Cerdas, Kreatif dan Produktif". https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3980/Kemkominfo%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+Capai+82+Juta/0/berita_satker. Diakses 19 Februari 2020.

Undang-Undang

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

- _____. *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*. UU No. 8 Tahun 1981. LN No. 76 Tahun 1981. TLN No. 3209.
- _____. *Undang-Undang Tentang Hukuman Tutupan*. UU No. 20 Tahun 1946. BN No. II Tahun 1946.
- _____. *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 48 Tahun 2009. LN No. 157 Tahun 2009. TLN No. 5076.
- _____. *Undang-Undang Tentang Keterbukaan Informasi Publik*. UU No. 14 Tahun 2008. LN No. 61 Tahun 2008. TLN No. 4846.
- _____. *Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. UU No. 11 Tahun 2012. LN No. 82 Tahun 2011. TLN No. 5234.
- _____. *Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. UU No. 13 Tahun 2006. LN No. 64 Tahun 2006. TLN No. 4635.
- _____. *Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*. UU No. 50 Tahun 2009. LN No. 159 Tahun 2009. TLN No. 5078.
- _____. *Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. UU No. 51 Tahun 2009. LN No. 160 Tahun 2009. TLN No. 5079.
- _____. *Undang-Undang Tentang Peraturan Hukum Pidana*. UU No. 1 Tahun 1946. LN No. 157 Tahun 1958. TLN No. 1660.
- _____. *Undang-Undang Tentang Sistem Pemasyarakatan*. UU No. 12 Tahun 1995. LN No. 77 Tahun 1995. TLN No. 3614.
- _____. *Undang-Undang Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer*. UU No. 2/Pnps/1964. LN No. 38 Tahun 1964.

Peraturan

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*. PP No. 61 Tahun 2010. LN No. 99 Tahun 2010. TLN No. 5149.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan*. PP No. 59 Tahun 1999. LN No. 112 Tahun 1999. TLN No. 3858.

Mahkamah Agung. *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan*. Perma No. 2 Tahun 2011.

_____. *Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan*. SK No. 144 Tahun 2007.

_____. *Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan*. SK No. 1-144 Tahun 2011.

_____. *Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi*. SK No. 1-114 Tahun 2011.

Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)*. Resolusi 217 A (III) 10 Desember 1948.

